

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, dan merupakan kewajiban yang harus dibayarkan per waktu tertentu oleh setiap warga negara, baik itu pembayaran oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mengambil andil paling besar, dan cara pemungutan pajak yang diterapkan pemerintah tertera dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam proses pemungutannya dapat dilakukan secara paksa karena pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Para wajib pajak tidak akan langsung mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan kepada negara, tetapi melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari hasil pemungutan pajak.

Pajak merupakan penopang utama beban belanja APBN pemerintah Indonesia. Peningkatan pengeluaran belanja negara memberikan dampak pada penetapan target penerimaan pajak yang setiap tahunnya terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target penerimaan pajak dengan berpedoman terhadap pertumbuhan potensi pajak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan pajak hingga April 2022 mencapai

Rp567,69 triliun. Capaian tersebut merupakan 44,88 persen dari total target yang ditetapkan di dalam APBN yaitu sebesar Rp1.265 triliun. Penerimaan pajak pada April 2022 mengalami pertumbuhan 51,49 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp374,7 triliun. Menteri Keuangan juga mengungkapkan kontribusi penerimaan pajak pada April 2022 terbesar berasal dari PPh Badan. Pendapatan PPh Badan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 0,5 persen, sedangkan tahun ini melonjak 105,3 persen. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari penerimaan pajak secara keseluruhan PPh Badan berkontribusi paling dominan, yaitu sebesar 29,3 persen ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga berfokus pada pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan harapan bahwa infrastruktur yang maju dan memadai dapat meningkatkan daya saing pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur kota untuk membentuk fasilitas yang lebih baik. Pengembangan tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga APBN perlu disusun kembali untuk mendukung tujuan pemerintah dan mencukupi anggaran yang dibutuhkan. Di Indonesia, pendapatan pajak adalah salah satu pendapatan utama terbesar pemerintah dan anggaran tersebut disubsidikan untuk membangun fasilitas umum yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat di beberapa sektor.

Sedangkan, dalam kacamata perusahaan, pajak yang dapat menguntungkan pemerintah tersebut menempatkan wajib pajak perusahaan kepada kondisi yang sebaliknya. Selain karena pembayaran pajak tidak memberikan dampak secara

langsung kepada perusahaan, tetapi juga beban pajak dapat mengurangi pendapatan dan surplus kas perusahaan. Perusahaan melakukan manajemen pajak dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayar perusahaan dapat ditekan serendah mungkin (Khoirul Nisa & Wulandari, 2021). Pihak manajemen perusahaan cenderung menjadi bagian yang bertanggungjawab untuk meminimalisir pembayaran pajak, memotong nominal sebanyak yang memungkinkan dan untuk dapat melakukan hal tersebut pihak manajemen perusahaan biasanya melakukan perencanaan pajak. *Tax Avoidance* merupakan salah satu strategi dari perencanaan pajak.

Kondisi ekonomi selama masa pandemi COVID-19 mengakibatkan berkurangnya tarif penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk merevitalisasi kegiatan ekonomi dengan memberikan manfaat berupa insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak COVID-19. Namun, perusahaan memanfaatkan program tersebut sebagai celah untuk melakukan proses penghindaran pajak.

Sistem pembayaran pajak di Indonesia tertera dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2007 yang menerangkan mengenai penerapan sistem Self-Assessment, yaitu tiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar, serta memberitahukan kewajiban pajak sendiri. Hal ini menjadi salah satu celah dari peraturan perpajakan yang memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara sah atau legal dimata hukum. Dengan penghindaran pajak, beban pajak dapat dikurangi.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak yang wajar karena berdasarkan hukum yang berlaku.

Fenomena pertama merupakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan teknologi besar Google, Facebook, dan Microsoft pada 2020 yang melakukan penghindaran pajak di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia, dengan memanfaatkan celah dari sistem pembayaran pajak global agar dapat terhindar dari pembayaran pajak. Tindakan tersebut memberikan kerugian kepada negara karena pajak sebesar USD 2.8 miliar atau setara dalam rupiah yaitu sebesar Rp. 41 triliun per tahun yang seharusnya diterima sebagai pendapatan negara, pada kenyataannya tidak ada pemasukan dari itu. Akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan dimasa pandemi oleh perusahaan tersebut, mengakibatkan beberapa negara seperti Indonesia, India, Brasil, Migeria dan Bangladesh tidak menerima kontribusi langsung dari dana pajak yang seharusnya dialokasikan pada pelayanan publik. ([www.idxchannel.com](http://www.idxchannel.com)).

Fenomena penghindaran pajak kedua yaitu dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang terungkap pada tahun 2019. *Global Witness* dalam siaran pers melaporkan bahwa PT. Adaro diindikasikan melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan sejumlah laba ke salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, sehingga mereka membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan melakukan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing* tersebut, PT. Adaro berhasil mengurangi tagihan pajak di Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta dari tahun 2009-2019. Hal tersebut berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah

Indonesia dalam pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memnuhi kepentingan umum. ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Fenomena yang diuraikan diatas merupakan beberapa dari banyaknya contoh kasus terkait penghindaran pajak yang ada di Indonesia. Penghindaran pajak merupakan usaha penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Permasalahan mengenai pro dan kontra mengenai penghindaran pajak adalah pembahasan yang masih selalu dibahas oleh para pengamat dan penggiat perpajakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penulis pun ingin turut berkontribusi dalam pembahasan terkait penghindaran pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan atau perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain adalah *capital intensity*, *inventory intensity* dan *leverage*.

*Capital Intensity* adalah apabila jumlah asset tetap milik perusahaan besar maka, dapat mengakibatkan biaya penyusutan asset tetap semakin tinggi yang secara otomatis dapat menimbulkan keuntungan perusahaan menjadi turun, sehingga pajak perusahaan kian mengalami penurunan dan jika perusahaan tersebut mempunyai CETR yang rendah maka, dapat membuat tindakan Tax Avoidance yang semakin meningkat. (Novitasari, Shelly, 2017).

*Inventory Intensity* adalah tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan dapat menimbulkan berkurangnya keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat membayar pajak lebih kecil ketika perusahaan mendapatkan pengurangan

keuntungan. CETR perusahaan juga akan menurun. Dengan menurunnya CETR perusahaan maka Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan akan menjadi meningkat. (Adisamartha & Noviari, 2015).

*Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai komposisi pembiayaan maka akan menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. (Deanna & Meiriska, 2017)

Alasan penulis memilih menggunakan *capital intensity* sebagai variabel independen adalah jika intensitas aset tetap suatu perusahaan semakin tingginya, maka dapat memungkinkan terjadinya penghindaran pajak, karena perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan pada asset tetap sebagai pengurang laba perusahaan yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Inventory intensity* atau tingkat persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Ini diakibatkan adanya beban-beban yang diakibatkan adanya persediaan. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu, *leverage* jika dalam komposisi pembiayaan perusahaan menerapkan hutang, maka hal tersebut dapat memicu munculnya beban bunga yang harus dibayarkan dan dijadikan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Dan jika sebuah perusahaan menerapkan *equity financing* dalam pembiayaan

perusahaan maka perusahaan berkewajiban untuk membayar dividen, yang dimana dividen tersebut tidak dapat menjadi pengurang untuk penghasilan kena pajak.

Alasan penulis memilih sub sektor makanan dan minuman daripada sektor lainnya di penelitian kali ini dikarenakan pada triwulan II tahun 2021 subsektor makanan dan minuman masuk kedalam posisi lima besar yang menyumbang pendapatan pajak dengan persentase sebesar 6,66% dari jumlah keseluruhan yaitu 17,34%. Selain itu juga, makanan dan minuman termasuk kedalam kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi setiap harinya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian penjelasan dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak memberikan hasil yang signifikan, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian sebagai berikut :

1. Pajak masih dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan atau laba bagi perusahaan.

2. Perusahaan cenderung menginginkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin sehingga adanya kecenderungan perusahaan untuk memanipulasi jumlah laba agar terhindar dari beban pajak yang besar.
3. Kelemahan regulasi pajak dimanfaatkan perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menekan beban pajak menjadi seminimal mungkin.
4. *Tax Avoidance* menghambat pembangunan infrastruktur yang berakibat pada rencana pemerintah untuk meningkatkan daya saing pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
2. Bagaimana *inventory intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
3. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.



5. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
6. Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui *capital intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
2. Untuk mengetahui *inventory intensity* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
3. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.

4. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Empiris**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan mengenai *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, serta *Tax Avoidance*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage* terhadap *tax avoidance*.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan pajak dan kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak, agar tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* tidak dilakukan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghindaran pajak atau *tax avoidance* serta menjadi dasar dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

### **1.5 Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021. Data yang diolah dalam penelitian ini diambil dan dikoleksi melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website perusahaan terkait. Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Definisi Akuntansi**

Akuntansi mempunyai fungsi memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi tentang posisi keuangan serta hasil kinerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dari berbagai pihak yang ada (Hery, 2012:1).

Menurut Sirait dkk (2014:2) definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengelolaan data keuangan menjadi suatu informasi mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.”

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB, 2017) definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.”

Menurut Sumarsan (2017:1) definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan pemaparan dari beberapa definisi akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan media untuk menghitung, mengukur dan menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak-pihak berkepentingan, sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan atas kegiatan bisnis yang dijalankan dan menilai kinerja beserta kondisi ekonomi perusahaan.

### **2.1.2 Agency Theory**

Menurut Supriyono (2018:63) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut:

“Keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara principal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan.”

Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kepentingan yang dimiliki oleh *agent* dan *principal*. *Agent* menginginkan nilai dan laba perusahaan meningkat agar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Untuk itu *agent* melakukan penghindaran pajak agar laba yang didapat oleh perusahaan meningkat. Sedangkan *principal* tidak menginginkan penghindaran pajak, karena hal tersebut dianggap sebagai cara untuk manipulasi laporan keuangan. (Hendriksen, 2000 dalam Gustina 2009).

Teori keagenan (*agency theory*) digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang cenderung memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda mengenai kepatuhan terhadap regulasi pemerintahan, utamanya dalam masalah pembayaran pajak.

### 2.1.3 *Capital Intensity*

#### 2.1.3.1 Definisi Modal

Menurut Munawir (2014:19) definisi modal adalah sebagai berikut:

“Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda, yang dapat berupa dana, barang yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Sedangkan menurut Lawrence J. Gitman, definisi modal adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang perusahaan miliki, dan juga segala hal yang berada pada bagian kanan neraca perusahaan kecuali kewajiban yang saat ini.

#### 2.1.3.2 Definisi *Capital Intensity*

Menurut Sartono (2010:120) pengertian intensitas modal atau *capital intensity* adalah sebagai berikut:

“*Capital Intensity* merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai properti, terhadap penjualan.”

Menurut Noor *et al.*, 2010:190 dalam Mulyani *et al.*, *Capital Intensity* atau intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau

peningkatan aktiva tetap. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai property terhadap total aktiva.

### 2.1.3.3 Metode Pengukuran *Capital Intensity*

Indikator yang digunakan dalam pengukuran *capital intensity* yaitu dengan membagi total asset tetap bersih (*net fixed asset*) dengan total asset (Lanis dan Richardson, 2012). Cara ini digunakan oleh Andhari (2017), Fahrani (2017), Latifah (2018) dan Ganiswari (2019). Dalam beberapa penelitian tersebut pengukuran *capital intensity* dirumuskan sebagai berikut:

$$CINT = \frac{Net\ Fixed\ Asset}{Total\ Asset} \times 100\%$$

## 2.1.4 *Inventory Intensity*

### 2.1.4.1 Definisi Persediaan

Persediaan (*inventory*) dikategorikan sebagai barang dagangan yang dimiliki dan disimpan untuk dijual kepada para pelanggan (*customers*). Akun persediaan dilaporkan dalam neraca (*Balance Sheet*) sebagai bagian dari kelompok aset lancar (*current asset*); sedangkan barang dagangan yang sudah laku terjual akan dilaporkan pada laporan laba rugi (*income statement*) sebagai harga pokok penjualan (*cost of good sold*) yang akan mengurangi pendapatan penjualan (*sales revenue*) Elvy Maria Manurung (2011:53).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:14.2) persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk

bahan atau bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai.

Menurut Agus (2013:53) persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja.

#### **2.1.4.2 Definisi *Inventory Intensity***

*Inventory Intensity Ratio* (IIR) atau Rasio Intensitas Persediaan menggambarkan hubungan antara barang yang dijual dengan jumlah persediaan yang ada ditangan dan digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran efisiensi (Putri *et al*, 2016).

*Inventory Intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi labar dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang (Andhari, 2017).

Tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2010:247). Beban-beban tersebut mempengaruhi jumlah laba bersih yang dimiliki oleh



perusahaan menjadi berkurang dan hal tersebut dapat menimbulkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkurang.

#### **2.1.4.3 Metode Pengukuran *Inventory Intensity***

Indikator yang digunakan dalam pengukuran *inventory intensity* yaitu dengan cara membagi total persediaan (*inventory*) dengan total asset (Lanis dan Richardson, 2012). Cara ini digunakan oleh Andhari (2017), Fahrani (2017), Latifah (2018), Dwiyanti (2019). Pengukuran *inventory intensity* ini digunakan karena ketika perusahaan mempunyai intensitas persediaan yang tinggi maka perusahaan mampu untuk melakukan efisiensi biaya, sehingga laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat meningkat. Rumus *inventory intensity* menurut Lanis dan Richardson (2012) adalah sebagai berikut:

$$INVINT \frac{Inventory}{Total Asset} \times 100\%$$

#### **2.1.5 Leverage**

##### **2.1.5.1 Definisi Hutang**

Menurut Fahmi (2015:160) pengertian hutang adalah sebagai berikut:

“Hutang adalah kewajiban (liabilities). Maka liabilities atau hutang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya.”

Hutang adalah sebuah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sebuah sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. (Munawir 2010:18).

### 2.1.5.2 Jenis-Jenis Hutang

Menurut Fahmi (2013:163) jenis-jenis utang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Utang jangka pendek (*Short-term liabilities*)

Utang jangka pendek sering disebut juga sebagai utang lancar (*current liabilities*). Utang jangka pendek atau utang lancar ini biasanya digunakan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya menyokong kegiatan perusahaan secara langsung atau segera dan tidak bisa ditunda. Pada umumnya, utang jangka pendek memiliki batas waktu pengembalian maksimal satu tahun. Berikut merupakan yang termasuk ke dalam kategori utang jangka pendek:

- a. Utang dagang (*account payable*) yaitu pinjaman yang timbul karena pembelian barang dagang dengan jasa kredit.
- b. Utang wesel (*notes payable*) yaitu promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah dari pihak lain pada tanggal yang telah ditentukan utang wesel).
- c. Penghasilan yang ditangguhkan (*deferred revenue*) yaitu penghasilan yang belum menjadi hak perusahaan. Hal ini di klaim sebagai penghasilan yang ditangguhkan ketika pihak lain telah menyerahkan pembayaran kepada perusahaan, sedangkan perusahaan belum menyerahkan barang atau jasanya.
- d. Utang gaji
- e. Utang pajak

## 2) Utang jangka Panjang (*Long-term liabilities*)

Utang jangka panjang sering disebut juga sebagai utang tidak lancar (*non-current liabilities*). Utang jangka panjang ini disebut sebagai utang tidak lancar dikarenakan dana yang dipakai dari sumber utang ini digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Sifat pembiayaan jangka panjang ini merupakan asset yang tidak bisa disentuh (*tangible asset*) dan ketika dijual kembali pada masa mendatang memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu penggunaan dana utang jangka panjang dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan, pembelian tanah, dan sebagainya. Berikut merupakan yang termasuk ke dalam kategori utang jangka panjang:

- a. Utang obligasi
- b. Wesel bayar
- c. Utang perbankan dengan kategori jangka panjang.

### 2.1.5.3 Definisi *Leverage*

Menurut Kurniasih dan Sari (2013:63) definisi *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total aset perusahaan.”

*Leverage* dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost*

*assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Selain itu *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. (Kasmir, 2015:151).

Kasmir (2016:153) menjelaskan bahwa tujuan perusahaan menggunakan rasio hutang (*leverage*) antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayain oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, tersapat sekian kalinya modal yang sering dimiliki, dan;
8. Tujuan lainnya.

Selain itu, Kasmir (2015:154) juga menjelaskan mengenai manfaat rasio *leverage*, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman atau bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan;
8. Manfaat lainnya.

#### **2.1.5.4 Metode Pengukuran *Leverage***

Menurut Kasmir (2015:151) rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang akan ditanggung oleh perusahaan dibandingkan jika dibandingkan dengan aktiva perusahaan. Dalam artian luas, dikatakan bahwa rasio *solvabilitas* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat

melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari utang (utang jangka panjang atau utang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *financial leverage* dari suatu perusahaan. Indikator rasio *leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Kasmir (2015:151) mendefinisikan *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebagai berikut:

“*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan yang proporsi relative antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

Terdapat banyak cara untuk menghitung *leverage*, dalam penelitian ini perhitungan *leverage* menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DER) sebagai metode perhitungan, karena jika praktik dari penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan, ini dapat dijadikan sebagai strategi untuk menghemat pajak. Hal ini terjadi dengan anggapan bahwa terdapat imbalan modal yang ditawarkan kepada kreditor sebagai jaminan melalui dividen. Dividen merupakan biaya yang tidak dapat menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak.

*Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan sebagai indikator perhitungan dengan cara membandingkan total hutang suatu perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki. DER ini merupakan pengukuran yang dipakai dalam proses menganalisis

leporan keuangan perusahaan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur jika memberikan dana kepada perusahaan tersebut sebagai hutang. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) menurut Kasmir (2015:158) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}} \times 100\%$$

## 2.1.6 Tax Avoidance

### 2.1.6.1 Definisi Pajak

Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2017:1) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Definisi Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pemaparan dari beberapa definisi pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban terutang setiap warga negara kepada negara yang tertera dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dengan timbal balik dari pembayarannya tidak bisa didapatkan secara langsung.

#### **2.1.6.2 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:3) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

##### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan sebagainya.

##### 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **2.1.6.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak ada beberapa sistem pemungutan, (Siti Resmi, 2017:10) yaitu:

##### a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.



Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak ini diberi kepercayaan untuk:

1. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
2. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

#### **2.1.6.4 Jenis–Jenis Pajak**

Dalam buku Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak hanya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Cara mengelompokkan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Berikut merupakan ketiga unsur tersebut :

- 1) *Penanggung jawab pajak* adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) *Penanggung pajak* adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) *Pemikul pajak* adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak menurut Lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPN, PPh dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **2.1.6.5 Manajemen Pajak**

Menurut Pohan (2013:18) pengertian manajemen pajak adalah sebagai berikut:

“Manajemen perpajakan merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.”

Pohan (2013:14) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen perpajakan antara lain adalah untuk *tax planning*, *tax admission/tax compliance*, *tax audit*. Dalam *tax planning* terdapat tiga macam cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah bebannya, yaitu dengan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak), dan *Tax Saving* (Penghematan Pajak).

#### **2.1.6.6 Tax Avoidance**

Menurut Pohan (2013:23) pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax avoidance* adalah strategi dan Teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.”

Menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandi (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
2. Seringkali dimanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahsiaannya sedalam mungkin.

Ronen, Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

- a. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- b. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
- c. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1) Kesempatan (*Opportunities*)

Adanya sistem *self-assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiscus. Hal ini memberikan kesemoatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2) Lemahnya Penegak Hukum (*Low Enforcement*)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3) Manfaat dan Biaya (*Level of Penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan pendapatan.

4) Bila Terungkap Masalahnya Dapat Diselesaikan (*Negotiated Settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa

untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

#### 2.1.6.7 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak dapat diukur melalui rasio pajak suatu negara. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap Kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak (Sari, 2014).

Terdapat banyak metode yang dapat dilakukan untuk pengukuran *tax avoidance*, diantaranya yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Cara menghitungnya yaitu dengan melakukan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menunjukkan jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan merupakan tarif pajak efektif yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. *Current Effective Tax Rate* (CuETR) menunjukkan besaran pajak saat ini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final. CuTER ini merupakan perbandingan pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Rumus yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung CETR. Menurut Dyreng, dkk (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng dkk (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab permasalahan dan keternatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Kriteria *tax avoidance* dilakukan dengan cara mengelompokkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Budiman & Setiyono (2012) perusahaan melakukan *tax avoidance* apabila CETR yang dibayarkan oleh perusahaan kurang dari 25%.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Tax Avoidance**

Nilai CETR	Kriteria
CETR < 25%	Melakukan penghindaran pajak
CETR > 25%	Tidak melakukan penghindaran pajak

Sumber: Budiman & Setiyono (2012)

### 2.1.7 Hasil Penelitian Terhadulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, serta *Tax Avoidance*.

**Tabel 2.2**  
**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil
----	----------	-------	-------

1.	Jefry Candra, Julia Anita, Widya dan Ninta Katharina (2021).	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , <i>Green Accounting</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.	Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Inventory intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Green accounting</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
2.	Eko Wahyu Nugrahadi dan Muammar Rinaldi (2020).	<i>The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)</i> .	<i>Capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Inventory intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019).	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak.	Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Inventory intensity</i> memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Cicik Suciarti, Elly Suryani dan Kurnia (2020).	<i>The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance</i> .	<i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Deferred tax expense</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5.	Luh Pringgita Tami Sarasmita	Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Eksekutif,	Intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap



	dan Ni Made Dwi Ratnadi (2021).	Kepemilikan Institusional dan <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Tax Avoidance</i> Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kepemilikan insitusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Muhammad Daffa Wardhan, Dianwicaksih Arieftiara dan Andy Setiawan (2022).	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan <i>Environmental Uncertainty</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Corporate Sosial Responsibility</i> memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Environmental Uncertainty</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Anisya Widya, Eka Yulianti, Masita Oktapiani dan Eka Rima Prasetya (2021).	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Inventory intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Roslan Sinaga dan Herman Malau (2021).	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak.	<i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Inventory intensity</i> memiliki terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9.	Vidiyana Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan dan Proksi Kepemilikan Institutional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Leverage</i> dan <i>Profitability</i> memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10.	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, dan Kurnia (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Inventory Intensity</i> tidak memiliki

			pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
--	--	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, yang digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Perbedaan antara pemerintah dan perusahaan dalam hal pembayaran pajak adalah pemerintah menginginkan agar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam jumlah yang besar, sedangkan perusahaan mengusahakan agar beban pajak yang akan dibayarkan berjumlah seminimal mungkin (Hardika, Kurniasih dan Sari, 2013).

*Tax avoidance* merupakan usaha *taxpayers* (wajib pajak) dalam mencegah tingginya pajak terhutang yang dilakukan secara sah menurut hukum dengan cara tidak melanggar atau mencari kelemahan undang-undang perpanjangan (John Hutagaol, 2017). *Tax avoidance* sering kali dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan nominal yang besar, yang akan mengurangi laba perusahaan, untuk itu manajemen perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan undang-undang perpajakan.

Untuk menemukan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, penulis memilih *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek, yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan CETR tidak mudah terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi penyisihan nilai atau perlindungan pajak, sehingga baik

digunakan untuk menggambarkan secara keseluruhan kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Kerangka penelitian ini menunjukkan pengaruh variable independen, yaitu *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* terhadap variable dependen, yaitu *tax avoidance*. Penjelasan dari kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sandra dan Anwar (2018) *capital intensity* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini diakrenakan aset tetap perusahaan setiap tahunnya selalu menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin tinggi *capital intensity* sebuah perusahaan, maka semakin tinggi kesempatan untuk sebuah perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Menurut (Novitasari, Shelly, 2017) *Capital intensity* ialah apabila jumlah aset tetap milik perusahaan besar maka, dapat mengakibatkan biaya penyusutan aset tetap semakin tinggi yang secara otomatis dapat menimbulkan keuntungan perusahaan menjadi turun, sehingga pajak perusahaan kian mengalami penurunan dan jika perusahaan tersebut mempunyai ETR yang rendah maka, tindakan pelaksanaan *tax avoidance* semakin meningkat.

Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Investasi perusahaan pada aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi. Biaya tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak. Ketika *capital intensity* meningkat, nilai

ETR perusahaan akan menurun yang disebabkan oleh biaya tambahan tersebut. Maka, perusahaan akan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakannya atau tindakan penghindaran pajak perusahaan akan meningkat (Dwiyanti dan Jati, 2019).

**Hipotesis 1: *Capital Intensity* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.**

**2.2.2 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Inventory intensity* menunjukkan seberapa banyak sebuah perusahaan menginvestasikan dananya pada persediaan. Semakin tinggi jumlah persediaan, maka semakin tinggi pula biaya persediaan, dimana perhitungan dari biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang dari laba perusahaan yang akan menurunkan tingkat profitabilitas. Jika tingkat profitabilitas perusahaan menurun maka *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurun dan akan berakibat juga terhadap penurunan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penerapan *tax avoidance* meningkat (Eko Wahyu dan Muammar Rinaldi, 2020).

Menurut hasil penelitian oleh Dwiyanti dan Jati (2019), *inventory intensity* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan. Biaya-biaya tambahan tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Jika laba menurun, ETR juga akan mengalami penurunan yang dapat mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Maka dari itu, semakin tinggi

*inventory intensity* suatu perusahaan, maka semakin tinggi peluang *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

**Hipotesis 2: *Inventory Intensity* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.**

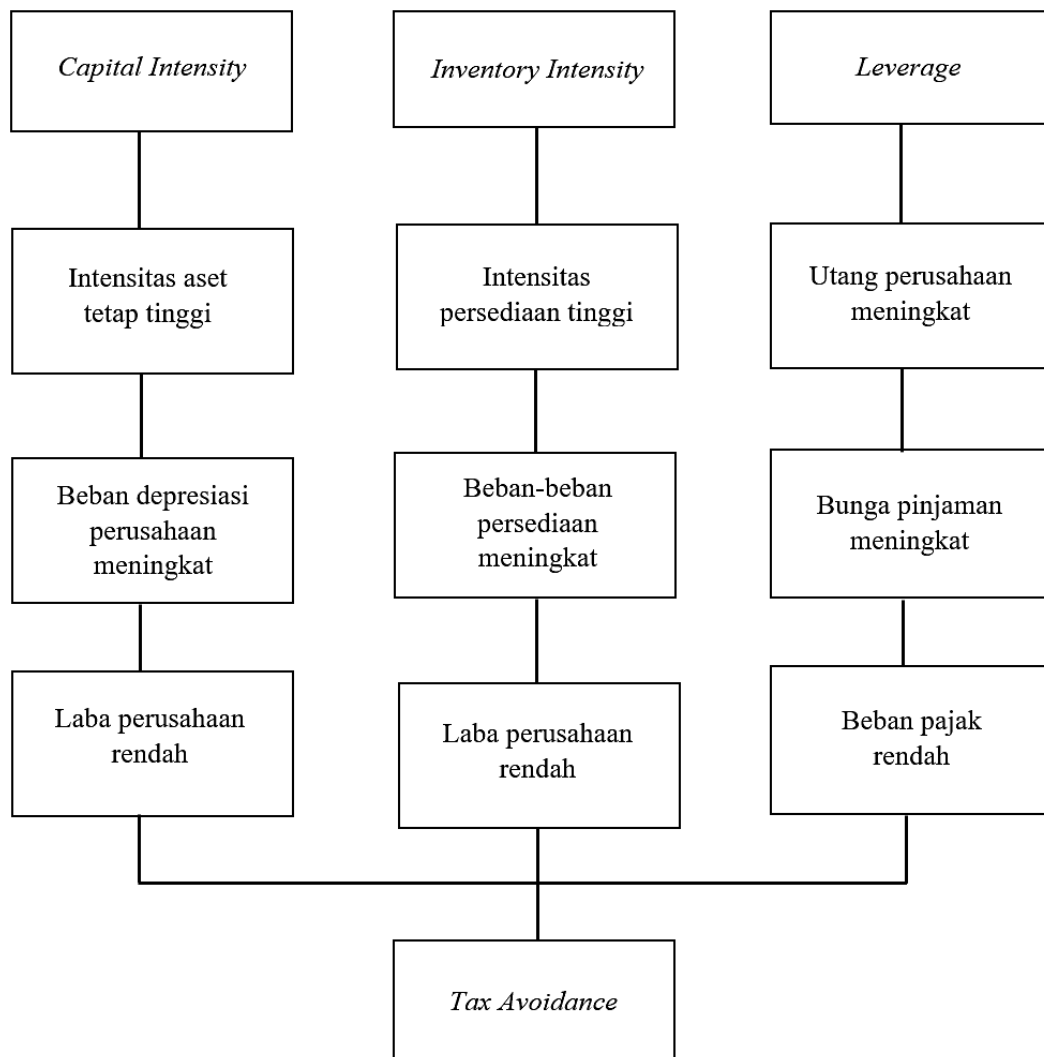
**2.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

Rasio *leverage* atau rasio *solvabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. (Hery, 2015:190).

Menurut Siregar & Widyawati (2016) perusahaan yang memiliki utang dengan jumlah yang tinggi untuk membiayai biaya operasionalnya dari pada pembiayaan yang berasal dari ekuitas, maka perusahaan tersebut dapat memiliki tingkat tarif pajak yang lebih rendah. Karena ketika memiliki utang yang tinggi, perusahaan dapat memanfaatkan bunga pinjaman yang dihasilkan dari utang tersebut agar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan rendah karena bunga yang berasal dari pinjaman akan mengurangi laba pada penghasilan sebelum kena pajak. Jika rasio *leverage* suatu perusahaan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, hal ini menyebabkan rendahnya atau berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan.

**Hipotesis 3: *Leverage* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.**

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Capital Intensity* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : *Inventory Intensity* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

H3 : *Leverage* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan oleh Sugiyono (2021:2) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terikat dengan tujuan penelitian.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Penerapan pendekatan metode ini diterapkan pada penelitian dikarenakan adanya hubungan dan tujuan dari beberapa variabel berbeda yang akan dianalisis untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan setiap variabel yang diteliti secara umum dengan terstruktur. Sugiyono (2021:16) mendefinisikan metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif juga pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.”



Sugiono (2021:64) mendefinisikan metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri). Penelitian ini tidak bertujuan untuk membandingkan anatar variabel satu dengan variabel lainnya dan juga bukan untuk mencari hubungan variabel satu dengan lainnya.”

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi mengenai *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan *tax avoidance*.

Metode penelitian verifikatif didefinisikan oleh Sugiyono (2021:66) adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas atau sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen.”

Pendekatan metode verifikatif ini digunakan untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, terhadap *tax avoidance*.

### **3.2 Unit Penelitian**

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan *annual report* yang telah dipublikasikan dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.sahamok.net](http://www.sahamok.net) dan *website* perusahaan terkait.

### 3.3 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2021:17) definisi dari objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak membengaruhi dinamika pada objek tersebut.”

Objek penelitian ini adalah *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan *tax avoidance*.

### 3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel

#### 3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:68) variabel penelitian didefinisikan adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu:

#### A. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Definisi variabel independent menurut Sugiyono (2021:69) adalah sebagai berikut:

“Variabel independent ini biasa juga disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) variabel bebas yang digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Capital Intensity* (Intensitas Modal)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi menurut Lanis dan Richardson (2011) dalam Husnaini et al (2013), *Capital intensity* adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya. *Capital intensity* pada umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Adapun indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel ini adalah indikator yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2012) sebagai berikut:

$$CINT = \frac{Net\ Fixed\ Asset}{Total\ Asset} \times 100\%$$

2) *Inventory Intensity* (Intensitas Persediaan)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi *inventory intensity* menurut Ardyansah (2014), *Inventory intensity* adalah bagian dari *capital intensity* rasio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan dengan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan.

*Inventory intensity* menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan. *Inventory intensity* merupakan substitusi dari *capital intensity*. Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur

variabel ini adalah indikator yang digunakan oleh Lanis dan Richardson (2012) adalah sebagai berikut:

$$INVNT = \frac{Inventory}{Total Asset} \times 100\%$$

### 3) *Leverage*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi *leverage* menurut Kasmir (2015:151) yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya.

Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel *leverage* adalah rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dicetuskan Kasmir (2015:158) yaitu sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio\ (DER) = \frac{Total\ Hutang}{Ekuitas} \times 100\%$$

### B. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Definisi variabel terikat menurut Sugiyono (2021:69) adalah sebagai berikut:

“Variabel terikat ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah *Tax Avoidance*. Menurut Wijayani (2016), *tax avoidance* merupakan usaha untuk

mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel dependen *tax avoidance* adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang mengacu pada penelitian Rinaldi (2015). Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

### 3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:38) definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

“Operasionalisasi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, antara lain:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel Independen (X)**  
*Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage*

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1.	<i>Capital Intensity</i> (X <sub>1</sub> ): “ <i>Capital intensity</i> adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. <i>Capital intensity</i> ”	Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap dengan total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap	$CINT = \frac{\text{Net Fixed Asset}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio

	<p>menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya. <i>Capital intensity</i> pada umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.”</p> <p>Lanis dan Richardson (2011) dalam Husnaini et al (2013)</p>	<p>perusahaan dari total aset yang dimiliki perusahaan.</p> <p>Muzzaki (2015)</p>	<p>Lanis dan Richardson (2012)</p>	
2.	<p><b><i>Inventory Intensity</i> (X<sub>2</sub>):</b>  “<i>Inventory Intensity</i> adalah bagian dari <i>capital intensity</i> rasio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan dengan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan.”</p> <p>Ardyansah, 2014</p>	<p><i>Inventory Intensity</i> menggambarkan proporsi persediaan yang dimiliki terhadap total aset perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset maupun modal terkait perpajakan dalam hal depresiasi.</p>	$INVNT = \frac{Inventory}{Total Asset} \times 100\%$ <p>Lanis dan Richardson (2012)</p>	Rasio
3.	<p><b><i>Leverage</i> (X<sub>3</sub>):</b>  “Rasio <i>leverage</i> merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang.”</p> <p>Kasmir 2015:151</p>	<p><i>Leverage</i> dihitung dengan cara membagi total utang (<i>debt</i>) dengan total ekuitas (<i>equity</i>) yang dimiliki oleh perusahaan.</p> <p>Kasmir 2015:158</p>	$DER = \frac{Total Utang (Debt)}{Ekuitas (Equity)} \times 100\%$ <p>Kasmir 2015:158</p>	Rasio

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel Independen (Y)**  
***Tax Avoidance***

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1.	<p><b><i>Tax Avoidance (Y):</i></b>  “<i>Tax avoidance</i> merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.”</p> <p style="text-align: right;">Wijayani, 2016</p>	<p>CETR menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena <i>cash ETR</i> tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan <i>Cash ETR</i> dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran <i>tax avoidance</i> berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil <i>cash ETR</i> artinya semakin besar penghindaran pajak, begitupula sebaliknya.</p> <p style="text-align: right;">Rinaldi, 2015</p>	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Rinaldi, 2015</p>	Rasio

### 3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.5.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2021:126) mendefinisikan populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sasaran khusus subsektor makanan dan minuman selama periode 2017–2021 yang berjumlah sebanyak 26 perusahaan. Tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

**Tabel 3.3**  
**Daftar Perusahaan yang menjadi Populasi Penelitian**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KODE
1	PT. FKS Food Sejahtera Tbk	AISA
2	PT. Tri Banyan Tirta Tbk	ALTO
3	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP
4	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
5	PT. Sariguna Primatirta Tbk	CLEO
6	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk	COCO
7	PT. Delta Djakarta Tbk	DLTA
8	PT. Diamond Food Indonesia Tbk	DMND
9	PT. Sentra Food Indonesia Tbk	FOOD
10	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD
11	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk	HOKI
12	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
13	PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk	IKAN
14	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
15	PT. Mulia Boga Raya Tbk	KEJU
16	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
17	PT. Mayora Indah Tbk	MYOR
18	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	PANI
19	PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk	PCAR
20	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN



21	PT. Palma Serasih Tbk	PSGO
22	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk	ROTI
23	PT. Sekar Bumi Tbk	SKBM
24	PT. Sekar Laut Tbk	SKLT
25	PT. Siantar Top Tbk	STTP
26	PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	ULTJ

Sumber: www.sahamok.net

### 3.5.2 Teknik Sampling

Sugiyono (2019:62) mendefinisikan teknik sampling adalah sebagai berikut:

“Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Ada beberapa Teknik sampling yang digunakan yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.”

Menurut Sugiyono (2019:63) menyatakan bahwa terdapat dua Teknik yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Probability Sampling*

Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

2. *Non-Probability Sampling*

Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Non-probability Sampling* atau sampling jenuh dengan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2016:85), *purposive sampling* adalah: “.... Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”

Alasan penulis menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu, sampel yang dipilih akan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah penulis tentukan, agar sampel yang digunakan dapat menjadi sampel yang representatif.

Berikut ini merupakan kriteria perusahaan yang tidak akan dijadikan sampel dalam penelitian ini:

1. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami *delisting* selama tahun penelitian.
2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang lengkap berturut-turut selama tahun penelitian.

Berikut merupakan hasil perhitungan sampel menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria di atas:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Perhitungan *Purposive Sampling***

Kriteria Sampel	Jumlah
<b>Perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang listing di BEI tahun 2017–2021</b>	<b>26</b>
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 1:</b> Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami <i>delisting</i> selama tahun penelitian.	<b>(1)</b>
<b>Pengurangan Sampel Kriteria 2:</b> Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan ( <i>annual report</i> ) dan laporan keuangan yang lengkap berturut-turut selama tahun penelitian.	<b>(14)</b>
<b>Total Sampel</b>	<b>11</b>
<b>Total Pengamatan (11 × 5 tahun)</b>	<b>55</b>

Sumber: Diolah penulis

### 3.5.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021) definisi sampel adalah sebagai berikut:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi sehingga sampel merupakan Sebagian dari populasi.”

Dalam penelitian ini terdapat 11 (sebelas) perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria pemilihan *purposive sampling* dan disajikan sebagai sampel penelitian.

**Tabel 3.5**  
**Daftar Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021 yang Menjadi Sampel Penelitian**

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk
2	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
3	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
4	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
5	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
6	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
7	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
8	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
9	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk
10	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
11	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk

Sumber: Data diolah penulis

### **3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Sumber Data**

Definisi sumber data menurut Sugiyono (2017:137) adalah data yang memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan Teknik pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil dari penelitian pihak lain.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh yaitu dari laporan keuangan tahunan dan *annual report* yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021 yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.sahamok.net](http://www.sahamok.net), dan *website* perusahaan terkait, antara lain:

1. Laporan posisi keuangan, data yang digunakan yaitu total aset.
2. Laporan laba rugi, data yang digunakan yaitu laba sebelum pajak atau laba bersih.
3. Laporan arus kas, data yang digunakan yaitu pembayaran pajak.
4. *Annual report*.

#### **3.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Penelitian kepustakaan atau (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pengolahan data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur berupa buku, jurnal, makalah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis dalam penelitian.

2) Riset Internet

Penulis berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data dari berbagai dokumen laporan keuangan yang terdapat didalam *website* Bursa Efek Indonesia melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.sahamok.net](http://www.sahamok.net), *website* perusahaan terkait dan *website* yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016:147) Teknik analisis data didefinisikan sebagai berikut:

“Teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan

data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Analisis data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3.7.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif didefinisikan oleh Sugiyono (2021:206) adalah sebagai berikut:

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada yang bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.”

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan informasi tentang variabel independen *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, dan variabel dependen *Tax Avoidance*. Untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata) dapat dilakukan dengan menentukan kategori penilaian dari setiap *mean* (rata-rata) perubahan pada variabel penelitian. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan tabel penilaian setiap variabel:

1. Menentukan jumlah kriteria, yaitu 5 kriteria.
2. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = (nilai maks – nilai min).
3. Menentukan *range* (jarak interval kelas) =  $\frac{\text{nilai maks} - \text{nilai min}}{5 \text{ kriteria}}$
4. Menentukan *mean* (rata-rata) perubahan pada setiap variabel penelitian.
5. Membuat tabel distribusi frekuensi untuk setiap variabel penelitian.

Adapun analisis deskriptif terkait variabel-variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

A. *Capital Intensity*

- a) Menentukan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- b) Menentukan total aset perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- c) Menentukan persentase *capital intensity ratio* dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- d) Menentukan nilai rata-rata intensitas modal untuk seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- e) Menentukan kriteria penilaian *capital intensity* berdasarkan tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Kriteria Penilaian Capital Intensity**

<b>Interval</b>	<b>Kriteria</b>
6,71% – 21,80%	Sangat Rendah
21,81% – 36,90%	Rendah
36,91% – 52,00%	Sedang
52,01% – 67,10%	Tinggi
67,11% – 82,20%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah penulis

- f) Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase *capital intensity ratio* dengan kriteria penilaian.

B. *Inventory Intensity*

- a) Menentukan total persediaan yang dimiliki perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- b) Menentukan total aset perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- c) Menentukan persentase *inventory intensity ratio* dengan membagi total persediaan dengan total aset perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- d) Menentukan nilai rata-rata intensitas persediaan untuk seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- e) Menentukan kriteria penilaian *inventory intensity* berdasarkan pada tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Kriteria Penilaian *Inventory Intensity***

Interval	Kriteria
1,10% – 5,39%	Sangat Rendah
5,40% – 9,69%	Rendah
9,70% – 13,99%	Sedang
14,00% – 18,29%	Tinggi
18,30% – 22,59%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah penulis

- f) Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase *capital intensity ratio* dengan kriteria penilaian.

### C. *Leverage*

- a) Menentukan total utang pada setiap perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.



- b) Menentukan total ekuitas pada setiap perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- c) Menentukan persentase *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas pada setiap perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- d) Menentukan nilai rata-rata kebijakan utang untuk seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman selama periode pengamatan.
- e) Menentukan kriteria penilaian *leverage* berdasarkan pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Kriteria Penilaian *Leverage***

Interval	Kriteria
0,13 – 0,55	Sangat Rendah
0,56 – 0,98	Rendah
0,99 – 1,41	Sedang
1,42 – 1,84	Tinggi
1,85 – 2,27	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah penulis

- f) Menarik kesimpulan dengan membandingkan persentase *leverage* dengan kriteria penilaian.

#### D. *Tax Avoidance*

- a) Menentukan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada periode pengamatan.
- b) Menentukan laba sebelum pajak.
- c) Membagi jumlah beban pajak perusahaan dengan jumlah laba sebelum pajak.

d) Menentukan kriteria penilaian *tax avoidance* berdasarkan tabel 3.8.

**Tabel 3.9**  
**Kriteria Penilaian *Tax Avoidance***

Nilai CETR	Kriteria	Dummy
CETR < 25%	Melakukan penghindaran pajak	1
CETR > 25%	Tidak melakukan penghindaran pajak	0

Sumber: Budiman & Setiyano (2012).

**Tabel 3.10**  
**Kriteria Kesimpulan *Tax Avoidance***

Jumlah Perusahaan	Kriteria
10 – 11	Seluruhnya melakukan penghindaran pajak
7 – 9	Sebagian besar melakukan penghindaran pajak
4 – 6	Sebagian melakukan penghindaran pajak
1 – 3	Sebagian kecil melakukan penghindaran pajak
0	Tidak ada yang melakukan penghindaran pajak

Sumber: Data diolah penulis

e) Menarik kesimpulan dengan membandingkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan kriteria penilaian.

### 3.7.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif menurut Sugiyono (2017:39) adalah sebagai berikut:

“Analisis verifikatif merupakan metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

Analisis verifikatif digunakan sebagai metode untuk membuktikan keabsahan dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini,

analisis verifikatif digunakan untuk menemukan pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage* terhadap *tax avoidance*.

### 3.7.2.1 Analisis Asumsi Klasik

Analisis asumsi klasik ini dilakukan untuk menguji kualitas yang tersaji pada sebuah data sehingga terverifikasi keabsahannya dan estimasi perbiasan dapat terhindari. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan 4 (empat) uji, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal.

Menurut Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka profitabilitasnya, yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018, 107), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independent. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya muktikolinearitas di dalam model regresi sebagai berikut:

1) Melihat nilai *Tolerance*

Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  maka terjadi multikolinearitas.

2) Melihat nilai *Variance Inflation Factor*

Jika nilai *VIF*  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai *VIF*  $> 10,00$  maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut homokedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Ada atau tidaknya masalah autokorelasi ditunjukkan oleh nilai *Durbin-Watson* ( $DW$ ), Ghozali (2015:239). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui autokorelasinya. Uji *Durbin-Watson* merupakan salah satu uji yang banyak digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, baik negatif maupun positif. Berikut merupakan tabel uji *Durbin-Watson*:

**Tabel 3.11**  
**Uji Durbin-Watson**

Nilai Statistik $d$	Hasil
DW dibawah -2	Terjadi autokorelasi positif
DW diantara -2 dan +2	Tidak terjadi autokorelasi
DW diatas +2	Terjadi autokorelasi negatif

Sumber: Winarno (2015:531).

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2017:275) mendefinisikan analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

“Analisis linier sederhana merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independed.”

Analisis regresi linier sederhana biasanya digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan rumus persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2017:275):

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax Avoidance</i>
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien Korelasi
X	= Variabel Independen

### 3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan menetapkan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ).

Menurut Sugiyono (2021:99) hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

#### Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji  $t$  melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Uji  $t$  dilakukan dengan cara

membandingkan antara  $t$ -statistik (nilai  $t$  yang diperoleh dari proses regresi) dengan nilai  $t$  yang diperoleh dari tabel.

Menurut Sugiyono (2021:248) untuk melakukan uji  $t$ , menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

$t$  = Nilai uji  $t$

$r$  = Koefisien korelasi

$r^2$  = Koefisien determinasi

$n$  = Jumlah sampel

Dari hasil perhitungan  $t$  statistik ini selanjutnya dibandingkan dengan  $t$  tabel dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Uji  $t$  menggunakan beberapa analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan antar variabel. Berikut dasar analisis yang digunakan pada uji  $t$ :

1. Perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ 
  - a) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
  - b) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Perbandingan nilai signifikan dengan taraf nyata
  - a) Jika nilai signifikan  $\geq$  taraf nyata (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

- b) Jika nilai signifikan  $<$  taraf nyata (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Rancangan penelitian hipotesis statistik ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu *Capital Intensity* ( $X_1$ ), *Inventory Intensity* ( $X_2$ ) dan *Leverage* ( $X_3$ ) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Adapun rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{01} : (\beta_1 = 0)$  *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_{a1} : (\beta_1 \neq 0)$  *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_{02} : (\beta_2 = 0)$  *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_{a2} : (\beta_2 \neq 0)$  *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_{03} : (\beta_3 = 0)$  *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

$H_{a3} : (\beta_3 \neq 0)$  *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kriteria untuk penerimaan dan penolakan hipotesis nol  $H_0$  yang digunakan adalah sebagai berikut:

- $H_0$  diterima jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ .
- $H_0$  ditolak jika nilai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

### 3.7.5 Analisis Korelasi

Menurut Sugiyono (2012:228) definisi dari analisis korelasi adalah sebagai berikut:



“Analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan lainnya, dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan linear antar dua variabel.”

Analisis korelasi ini diukur dengan menggunakan koefisien *Pearson Product Moment* ( $r$ ). menurut Sugiyono (2018:183), teknik korelasi digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus korelasi *Pearson Product Moment* ( $r$ ) adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{(n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

Dimana:

$r$  = Koefisien korelasi

$X$  = Variabel Independen

$Y$  = Variabel dependen

$N$  = Banyaknya sampel

Koefisien korelasi ( $r$ ) menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen ( $x$ ) dan variabel dependen ( $y$ ). nilai koefisiensi harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 ( $-1 < r \leq +1$ ) yang menghasilkan beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Jika  $r = 0$  atau mendekati 0, maka hal tersebut menunjukkan korelasi antar kedua variabel yang diteliti lemah atau tidak ada korelasi sama sekali.
- b. Jika  $r = +1$  atau mendekati +1, maka hal tersebut menunjukkan korelasi antar kedua variabel kuat dan searah. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai pengaruh positif.
- c. Jika  $r = -1$  atau mendekati -1, maka hal tersebut menunjukkan korelasi antar kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai pengaruh yang negatif.

Agar dapat menafsirkan koefisien korelasi yang dihasilkan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada kriteria ketentuan koefisien korelasi menurut Sugiyono (2018:184) sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Kriteria Koefisien Korelasi**

Interval	Kriteria
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2018:184)

### 3.7.6 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) definisi koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut:

“Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.”

Dalam penelitian ini analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menerangkan variasi variabel dependen.

Untuk mengetahui nilai dari koefisien determinasi secara parsial, maka menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besarnya pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan:

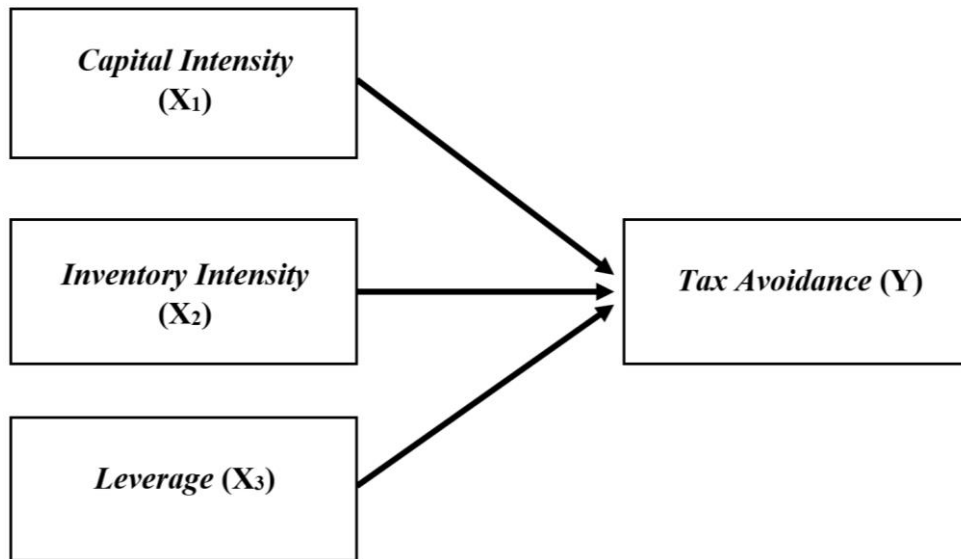
Kd = Koefisien determinasi

*Zero Order* = Koefisien korelasi

$\beta$  = Koefisien beta

### 3.8 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang dipilih oleh penulis yaitu “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2021)”. Maka untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen penulis memberikan model penelitian yang penelitian yang dinyatakan sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**